



Accepted: Oktober 2020	Revised: Januari 2021	Published: Februari 2021
----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Arah Baru Perencanaan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan

Abdul Muis Daeng Pawero

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

e-mail: abdul.pawero@iain-manado.ac.id

Abstract

Whether bad or qualified or poorly educated will be much influenced by the governance system. Educational governance systems will develop well when implemented through good systems by clean and professional managers. The system has been designed in detail by the government established through the number 19 of 2007 permendiknas on "Education Management Standards by the elementary and secondary education units". The minister is prepared by the government to set up a good, balanced and sustainable governance system. At the Inquiry planning level, program planning organized by educational institutions should reflect the vision, mission, objectives and work plan, as a raw material or reference of education policy at the managerial level. This paper will discuss the educational planning process and work plan of educational institutions in order to achieve shared ideals for a better educational future.

Keywords : *Educational Planning; Education Policy.*

Abstraks

Baik buruk atau berkualitas tidaknya pendidikan akan banyak dipengaruhi oleh sistem tata kelola. Sistem tata kelola pendidikan akan berkembang baik manakala dilaksanakan melalui sistem yang baik oleh para pengelola yang bersih dan profesional. Sistem tersebut telah dirancang secara terperinci oleh pemerintah yang ditetapkan melalui permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang "Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan Menengah". Permendiknas tersebut dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengatur sistem tatakelola yang baik, berimbang dan berkesinambungan. Di Level perencanaan Pendidikan, perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan adanya visi, misi, tujuan dan rencana kerja, sebagai bahan baku atau acuan kebijakan pendidikan di level manajerial. Tulisan

ini akan mendiskusikan proses perencanaan pendidikan serta rencana kerja lembaga pendidikan guna menggapai cita-cita bersama untuk masa depan pendidikan yang lebih baik.

Kata Kunci: Perencanaan Pendidikan; Kebijakan Pendidikan.

Pendahuluan

Proses informatisasi yang cepat karena kemajuan teknologi semakin membuat horison kehidupan di dunia semakin meluas dan sekaligus menjadikan bumi seakan semakin mengerut. Hal ini berarti pelbagai masalah kehidupan manusia menjadi masalah global atau setidaknya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kejadian di belahan bumi yang lain, baik masalah politik, ekonomi, maupun sosial. Kesetiakawanan sosial umat manusia semakin kental. Hal ini berarti kepedulian umat manusia terhadap sesamanya semakin merupakan tugas setiap manusia, pemerintah, dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan bertugas untuk mengembangkan kesadaran atas tanggung jawab setiap warga negara terhadap kelanjutan hidupnya, bukan saja terhadap lingkungan masyarakat dan negara, tetapi juga terhadap umat manusia. Karena itu, pendidikan merupakan salah satu penunjang ke arah kesadaran global ini¹.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab².

Hal tersebut berarti bahwa pendidikan merupakan penuntun, pembimbing dan penunjuk arah bagi para peserta didik agar mereka dapat tumbuh dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya, sehingga mereka dapat tumbuh, bersaing dan mempertahankan kehidupannya di masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan.

¹T.D.E., Ellong, dan Abdul Muis Daeng Pawero "Analisis Kritis Tentang Kebijakan Standar Proses Pendidikan Di Sekolah/Madrasah". *Proceeding; The 1st Annual Conference on Islamic Education Management*, no. 2 (2018), 847-852

²Undang-undang R.I, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal. 1

Berdasarkan pengertian pendidikan sebagaimana yang dijelaskan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Akan tetapi, di sisi lain, baik buruk atau berkualitas tidaknya pendidikan akan banyak dipengaruhi oleh sistem tata kelola. Sistem tata kelola pendidikan akan berkembang baik manakala dilaksanakan melalui sistem yang baik oleh para pengelola yang bersih dan profesional. Sistem tersebut telah dirancang secara terperinci oleh pemerintah yang ditetapkan melalui permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang “Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan pendidikan Dasar dan Menengah”. Permendiknas tersebut dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengatur sistem tata kelola yang baik, berimbang dan berkesinambungan.

Tata Kelola pendidikan tersebut meliputi; 1) Perencanaan Program; 2) Pelaksanaan Program Kerja; 3) Pengawasan dan Evaluasi; 4) Kepemimpinan Sekolah/Madrasah; 5) Sistem Informasi Manajemen; 6) Penilaian Khusus . Di level perencanaan, program yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan adanya visi, misi, tujuan dan rencana kerja sehingga dapat membantu pemerintah dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam rangka mengkaji perencanaan sebagai upaya merumuskan kebijakan pendidikan menghadapi tantangan di masa depan, paper ini akan mendiskusikan arah baru perencanaan pendidikan serta implikasinya bagi kebijakan pendidikan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pendidikan di Indonesia dan tantangannya

Sebagaimana umumnya kehidupan manusia, sebagian besar manusia ingin mengejar kehidupan yang berkualitas sepanjang hidup mereka. Kehidupan yang berkualitas merupakan faktor penting bagi seseorang untuk hidup bahagia, aman, dan memuaskan. Karenanya, untuk memperoleh kualitas kehidupan, manusia juga harus memiliki standar hidup. Mencapai standar hidup yang berkualitas, memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang manusiawi. Lembaga pendidikan merupakan tempat untuk meningkatkan taraf kehidupan yang berkualitas. Maka dari itu, lembaga pendidikan juga harus berkualitas, baik dari sisi

implementasi kurikulum, guru yang mengajar, maupun lingkungan tempat di mana siswa belajar³

Namun untuk mencapai kualitas pendidikan membutuhkan energi yang tidak sedikit, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apalagi memang masalah pendidikan memang begitu kompleks. Di samping masalah pemerataan pendidikan yang merupakan proses yang bertahap dan berkesinambungan, terdapat dua dampak dari akselerasi pembangunan sektor pendidikan, yaitu masalah kualitas pendidikan yang diakui masih kurang (bandingkan misalnya dengan kualitas pendidikan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia), serta relevansi hasil pendidikan dengan tuntutan pembangunan akan tersedianya tenaga kerja yang terampil dalam jumlah memadai untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka ataupun membuka lapangan kerja baru. Pendidikan di Indonesia ini menjadi semakin mengkhawatirkan dengan gejala semakin meningkatnya jumlah lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang menganggur atau setengah menganggur. Misalnya, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) Pusat mengatakan bahwa melalui data yang dikumpulkan, jumlah penyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia berasal dari para sarjana. Bahkan angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia meningkat sebanyak 25 persen sejak tahun 2017 sampai 2019⁴. Belum lagi misalnya jika mendiskusikan krisis moralitas para pelajar yang dapat dilihat dari maraknya pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, budaya mencontek, dan berbagai permasalahan lainnya.

Di sisi lain, kualitas kehidupan pendidikan juga terkait dengan kompetensi lembaga pendidikan dalam hal akomodasi perpustakaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengetahuan, sarana-prasarana yang memadai, serta program-program yang mengarahkan pada tujuan sosial lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tetap harus memfokuskan pada ranah kognitif siswa, sekaligus memperhatikan dan memberikan penilaian pada aspek afektif. Hal tersebut karena beberapa studi yang menunjukkan keberhasilan siswa justru banyak disebabkan faktor afektif⁵.

³Elitok Kesici, Ayşe, dan Veysel Karani Ceylan, "Quality of school life in Turkey, Finland and South Korea". *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, Vol. 9, No. 1, March 2020, pp. 100-108

⁴Ega Alfreda, "Lulusan Sarjana Menjadi Penyumbang Pengangguran Terbanyak di Indonesia". <https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/27/lulusan-sarjana-menjadi-penyumbang-pengangguran-terbanyak-di-indonesia/>

⁵N. Park, "Life satisfaction among Korean children and youth: A developmental perspective", *School Psychology International*, vol. 26, 2005, pp. 209-223,

Betapapun kompleksnya problematika maupun tantangan dunia pendidikan di Indonesia, point yang penting yang kiranya perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa lembaga pendidikan bukan hanya sekedar pelaksana kebijakan nasional atau kementerian pendidikan, ataupun preservasi nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Lembaga pendidikan, lebih dari itu haruslah dilihat sebagai salah satu kekuatan sosial yang ikut memberi bentuk, corak dan arah pada kehidupan masyarakat masa depan. Maka perencanaan pendidikan pada lembaga pendidikan haruslah menjadi fondasi utama bangunan pendidikan Indonesia di masa depan.

Perencanaan Pendidikan sebagai Rumusan Strategi Menghadapi Kompetisi Global

Abad 21 adalah abad perkembangan industri yang sangat pesat ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan masyarakat teknologi yang mampu memanfaatkan berbagai aplikasi teknologi, sehingga dapat mengubah cara berfikir, bertindak bahkan mengubah bentuk dan pola hidup manusia yang sama sekali berlainan dengan kehidupan sebelumnya. Dalam masyarakat yang seperti itu, peran lembaga pendidikan menjadi sangat dibutuhkan dalam memberikan dorongan, bimbingan maupun fasilitas kepada siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan serta keterampilan menggunakan teknologi.

Kemajuan industri yang pesat dalam dunia yang terbuka telah melahirkan budaya baru yaitu budaya materialisme dan komersialisme yang kemudian memicu lahirnya gaya hidup baru (*life style*) yang sangat konsumeristik. Dunia yang rata dan dikuasai pasar bebas menjadikan persaingan sebagai kewajiban bahkan kebutuhan dalam memicu hasil-hasil produksi yang semakin berkualitas dan terjangkau oleh rakyat banyak. Dengan adanya realitas global tersebut, lembaga pendidikan semakin ditantang untuk berkiprah. Bukan hanya membentengi diri dan menjaga kemungkinan dominasi bangsa lain, melainkan turut menjadi aktor dalam arena kompetisi global dengan bangsa lain. Sebagai upaya membangun fondasi lembaga pendidikan dalam bergerak menuju kompetensi global, optimalisasi perencanaan pendidikan menjadi sesuatu yang niscaya dalam mengembangkan pendidikan di level sekolah, serta sumber referensi kebijakan di level kebijakan pendidikan nasional.

Perencanaan pendidikan dalam menghadapi tantangan global ini berarti pemilihan atau penentuan program/strategi/langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan menghadapi tantangan di masa

Dirasah, Vol.4, No. 1, Februari 2021

depan. Perencanaan pendidikan yang dilakukan pada dasarnya adalah wujud tanggung jawab dari berbagai alternatif pilihan yang ada dalam kehidupan. Hakikat perencanaan pendidikan juga dapat berarti sebuah proses pembuatan peta/*route* perjalanan ke arah masa depan pendidikan yang diinginkan. Sebagai sebuah proses, perencanaan pendidikan terus akan berjalan tanpa henti, ia akan terus berkembang, memperbarui, dan menyesuaikan diri sepanjang proses perjalanan tersebut⁶. Dengan demikian, perencanaan pendidikan menghadapi tantangan global merupakan sebuah upaya untuk memaksimalkan akibat dari sebab-keputusan pilihan-yang diambil mengenai kebijakan pendidikan sekarang untuk masa depan serta sebagai upaya antisipasi akan adanya kebijakan pendidikan yang tidak tepat sasaran.

Sebagai bentuk rumusan perencanaan pendidikan menghadapi kompetensi Global sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat tiga indikator besar yang dapat penulis kedepankan dalam menopang perencanaan pendidikan tersebut, yaitu Kompetensi guru, optimalisasi kualitas lembaga pendidikan, serta implementasi Standar Nasional Pendidikan dengan maksimal.

Kompetensi Guru menghadapi tantangan abad 21

Abad 21 yang ditandai dengan arus informastisasi dan industrialisasi telah mengubah cara hidup manusia sebagai individu, sebagai masyarakat, dan sebagai warga bangsa. Perubahan gaya hidup, penggunaan *gadget*, *smartphone*, aplikasi digital, dan seterusnya menyebabkan proses industrialisasi dan informatisasi telah merasuk hingga ke sudut kehidupan umat manusia. Mulai kebutuhan primer hingga sekunder, mulai dari tempat kerja hingga di dalam kamar, menunjukkan tidak seorang-pun manusia untuk dapat menghindari dari arus industrialisasi dan informatisasi abad 21 ini. Menghadapi tantangan ini, guru dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, bersikap pasrah atau *nrimo* saja terhadap keadaan dan menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, atau *kedua* menjadi aktor yang berperan sebagai pemain dalam proses informatisasi dan industrialisasi tersebut.

Sebagai tenaga pendidik yang berperan sebagai aktor mewujudkan generasi bangsa yang kompeten dan berkarakter, mau tidak mau guru harus memilih pilihan kedua, yaitu harus menjadi aktor yang berperan sebagai pemain dalam proses informatisasi dan industrialisasi tersebut. Seiring dengan karakteristik abad 21 sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, maka guru ditantang untuk terus

⁶ Imam Machali, Didin Kurniadin, Manajemen Pendidikan; Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 145

meningkatkan profesionalitasnya sebagai pengajar maupun pendidik. Di samping profesionalitas, guru juga ditantang menghadapi beberapa kunci kesuksesan dunia pendidikan yaitu, kompetisi, karakter, integritas serta kualitas yang tinggi. Beberapa tantangan abad 21 yang harus disikapi guru dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini guru harus bisa menyesuaikan diri secara responsif, arif dan bijaksana. Responsif artinya guru harus bisa menguasai dengan baik produk IPTEK, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tanpa pengetahuan IPTEK yang baik, maka guru akan menjadi tertinggal bahkan menjadi korban IPTEK, yang pada akhirnya hanya menjadikan guru “pasrah” pada keadaan.
2. Krisis moral yang melanda Indonesia. Akibat pengaruh perkembangan aplikasi teknologi, telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda serta para siswa. Melalui pendidikan, guru ditantang untuk terus meningkatkan kreativitas menggunakan teknologi dalam menanamkan kemampuan berinovasi peserta didik sekaligus menanamkan nilai-nilai moral.
3. Krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Akibat perkembangan industri dan kapitalisme, maka muncul masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Mereka yang lemah dari sisi pendidikan, akses maupun ekonomi paling rentan menjadi korban. Merupakan tantangan guru untuk merespon realitas ini melalui dunia pendidikan. Sebab, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga harus mampu menghasilkan peserta didik yang siap hidup dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun.
4. Krisis identitas sebagaimana masyarakat Indonesia. Proses informatisasi dan industrialisasi abad 21 juga telah meradiasi identitas dan budaya bangsa Indonesia sehingga mempengaruhi semangat kebangsaan maupun nasionalisme generasi muda. Untuk itu, guru sebagai penjaga nilai-nilai serta karakter generasi muda termasuk semangat nasionalisme, harus mampu

memberikan kesadaran kepada generasi muda akan pentingnya jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam era informatisasi dan industrialisasi abad 21, guru bukan hanya sekedar mengajar, melainkan harus menjadi “manajer” dalam mengelola proses belajar. Maksudnya adalah, setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang merangsang kreativitas belajar, motivasi, serta kemampuan multimedia siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, dalam upaya meningkatkan profesionalitas, guru seharusnya memiliki kapasitas memadai dalam melakukan tugas membina, membimbing, serta mengarahkan peserta didik dalam menumbuhkan semangat keunggulan, motivasi belajar, keperibadian serta budi pekerti yang luhur yang sejalan dengan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, seorang guru profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas dalam menghadapi tantangan abad 21.

Optimalisasi Kualitas Lembaga Pendidikan

Peningkatan kualitas maupun daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan telah menjadi komitmen nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 menyebutkan tentang satu substansi inti program aksi bidang pendidikan yakni penataan ulang kurikulum sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah, juga menyiapkan tenaga terampil untuk bersaing dalam skala global khususnya menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN⁸. Dengan demikian, peningkatan kualitas lembaga pendidikan secara utuh sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kualitas Pendidikan merupakan isu penting yang tak pernah hilang dalam pengelolaan pendidikan. Sebab, lembaga pendidikan yang berkualitas menjadi perhatian utama setiap lembaga pendidikan. Segenap upaya lembaga pendidikan terus dikerahkan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikannya.⁹ Dalam

⁷ Fitri Oviyanti. “Tantangan Pendidikan Islam di Era Global.” Nadwa; Jurnal Pendidikan Islam, Vol.7, No. 2 (2013), 264-282

⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, BAB II, h. 34-41

⁹ Feiby Ismail, dan Mardan Umar “Implementasi Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Islam ;Studi Multisitus di MAN Model 1 Manado, MAN 1 Kotamobagu dan MAN 1 Kota Bitung.” Jurnal Ilmiah Iqra’ Vol. 14, No. 1 (2020), 78-95

upaya menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas, perlu ada kesepakatan kerjasama antara guru, orang tua, administrator dan peserta didik bahwa sekolah harus menjadi tempat yang memaksimalkan pembelajaran bagi peserta didik, di mana, peserta didik merasa bahagia dalam proses belajar. Lingkungan pembelajaran yang bahagia, tentunya akan menghasilkan keberhasilan akademis¹⁰. Keberhasilan akademik yang dimaksud adalah ketercapaian lembaga pendidikan dalam membantu merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Karena itu, suasana belajar juga dapat mengarahkan para siswa sebagai petunjuk arah bagi mereka untuk dapat tumbuh dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang sebenarnya, sehingga mereka dapat tumbuh, bersaing dan mempertahankan kehidupannya di era informatisasi dan industrialisasi abad 21.

Untuk memfungsikan pendidikan secara proporsional dan mengoptimalkan kualitas lembaga pendidikan, harus dilakukan perbaikan pada semua level strategis seperti level kebijakan pendidikan, level pengelola pendidikan, dan level pelaksana pendidikan (guru)¹¹. Namun yang patut mendapat perhatian secara serius adalah penanganan masalah pada level pelaksana pendidikan, karena bagaimanapun baiknya kurikulum, atau bagaimanapun juga memadainya sarana pendidikan, bila gurunya tidak mampu memainkan perannya dengan baik, maka kegiatan pendidikan tidak akan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Berhasil tidaknya kegiatan pendidikan di level ini, akan menentukan berhasil tidaknya kegiatan pendidikan secara keseluruhan di semua level strategis¹². Untuk itu, fungsi perencanaan pendidikan di samping diarahkan dalam rangka melakukan transformasi nilai-nilai positif, juga dikembangkan sebagai alat untuk memberdayakan semua potensi peserta didik agar mereka dapat tumbuh sejalan dengan tuntutan kebutuhan agama, sosial, ekonomi, maupun politik dalam menghadapi tantangan informatisasi dan industrialisasi abad 21.

Dari sisi politik, rumusan kebijakan pendidikan dari pemerintah juga harus berorientasi pada pengembangan keterampilan serta kreativitas peserta didik, masyarakat maupun generasi muda. Hal ini karena pendidikan merupakan sarana yang paling fundamental dalam kemajuan bangsa dan masyarakat. Sebagai

¹⁰ A.Danielsen, O. Samdal, J. Hetland, and B. Wold, "School-related social support and students'perceived life satisfaction," *The Journal of Educational Research*, vol. 102, No. 4, 303-320, DOI: 10.3200/JOER.102.4.303-320, 2010

¹¹ Abdul Muis Daeng Pawero. "Analisis Kritis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Islam." *JIEP; Journal of Islamic Education Policy*, Vol.2, No. 2 (2017), 166-178

¹² Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 7

pemegang kebijakan politik, pemerintah memiliki peranan besar dalam mengembangkan dan memperbaiki kualitas pendidikan. Pergolakan politik, artinya turun-naiknya iklim politik di suatu negara akan mempengaruhi kondisi pendidikan di negara tersebut¹³. Pendidikan yang berkualitas tentu tidak akan tercapai tanpa adanya program pendidikan yang mempersiapkan para warga negaranya atau para pelakunya dengan nilai-nilai yang ingin diwujudkan tersebut.

Implementasi Standar Nasional Pendidikan dengan Maksimal

Pendidikan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁴

Paradigma pendidikan tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari penjelasan di atas, jelas betapa penting posisi pendidikan di tengah-tengah maraknya informatisasi dan industrialisasi. Kehidupan global dalam dunia terbuka dengan perdagangan bebas serta kerjasama regional memerlukan manusia-manusia berkualitas. Manusia berkualitas adalah manusia yang bisa bersaing dalam arti yang baik. Dalam persaingan diperlukan kualitas individu sehingga hasil karya atau produk-produk yang dihasilkan dapat berkompetisi yang berarti mendorong ke arah kualitas yang semakin lama semakin meningkat. Kualitas yang baik dan terus meningkat hanya dapat diciptakan oleh manusia-manusia yang memiliki kemampuan berkompetisi. Kemampuan untuk berkompetisi hanya dapat dihasilkan

¹³ Muhammad Sholeh Hoddin. "Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi." *Jurnal Ilmiah Iqra'* Vol. 14, No. 1 (2020), 15-30

¹⁴ Undang-undang R.I, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal. 1

oleh pendidikan yang kondusif bagi lahirnya pribadi-pribadi yang kompetitif¹⁵. Keberhasilan lembaga pendidikan dalam mewujudkan peserta didik yang kompetitif dapat tercapai manakala segenap personalia yang terlibat dalam lembaga pendidikan terus berupaya mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan dalam lembaga pendidikannya¹⁶.

Salah satu point yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan adalah standar proses pendidikan. Ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran termasuk suasana dan lingkungan belajar saat proses pembelajaran berlangsung. Penyusunan standar proses pendidikan diperlukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan¹⁷. Dengan demikian, standar proses pendidikan dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran serta menentukan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga pendidikan.

Standar Proses Pendidikan merupakan salah satu dari 8 (delapan) standar nasional pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diperlukan untuk menentukan kualitas minimal proses pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru di setiap satuan pendidikan. Agar pembelajaran di dalam kelas bisa lebih berkualitas, setiap guru dapat mengembangkan proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Karenanya, proses pembelajaran yang berkualitas memiliki perananan sangat penting bagi pembentukan karakter dan pemberdayaan potensi peserta didik di setiap satuan pendidikan. Hal itu sangat beralasan, karena sebagian besar peserta didik akan menghabiskan waktu kehidupannya di dunia persekolahan selama 12 (dua belas) tahun.

Proses pendidikan selama itu sangat penting bagi peserta didik sebagai momentum untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi dirinya secara efektif dengan kesempatan dan tantangan yang mereka temukan, baik di masa sekarang sebagai anak muda maupun di masa yang akan datang sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, penyiapan peserta didik sejak dini dalam berbagai segi

¹⁵ H.A.R, Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 15

¹⁶ Abdul Muis Daeng Pawero. "Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, dan K-13." *Jurnal Ilmiah Iqra'* Vol. 14, No. 1 (2018), 42-59

¹⁷ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: 2019), h. 49

sangatlah beralasan. Standar proses pendidikan dapat digunakan sebagai acuan dalam arah baru perencanaan pendidikan.

Terkait dengan arah baru perencanaan pendidikan, maka perlu dilakukan upaya-upaya strategis sebagai langkah awal dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Ki Hajar Dewantara, sebagaimana dikutip oleh Dedy Mulyasana memandang penting diterapkannya pendekatan yang bersifat humanistik dalam proses pendidikan. Oleh sebab itu, ia memandang pentingnya diterapkan lima asas pendidikan sebagai berikut;

1. Asas Kemerdekaan. Proses penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kemerdekaan peserta didik. Mereka diberikan kemerdekaan tetapi tetap memperhatikan etika, aturan dan tata nilai yang berlaku. Asas kemerdekaan bukan berarti pendidikan yang bebas nilai tetapi kemerdekaan yang dikembangkan bersama etika, aturan dan tata nilai.
2. Asas Kodrat Alam. Proses pendidikan dilakukan sesuai dengan kodrat alam. Artinya, proses pendidikan dikelola dengan memperhatikan hakikat dan kodrat anak selaku manusia. Setiap anak memiliki keragaman bakat, sikap, kemampuan, minat dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pendidikan dikembangkan sejalan dengan hakikat dan keragaman tersebut.
3. Akses Kebudayaan. Proses pendidikan yang baik adalah proses pendidikan yang dilakukan dengan melakukan pendekatan budaya dan dikembangkan sejalan dengan tuntutan peradaban dan tantangan masa depan bangsa.
4. Asas Kebangsaan. Pendidikan dilakukan dengan memperhatikan asas kebangsaan. Artinya bahwa pengelolaan dan pembangunan pendidikan di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan jatidiri bangsa.
5. Asas Kemanusiaan. Pendidikan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan hakikat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia yang dilakukan secara manusiawi. Artinya, pendidikan tidak dimaksud mengubah anak didik menjadi mesin dan robot, tetapi mengembangkan potensi dan kemampuan anak sejalan dengan hakikat dirinya sebagai manusia¹⁸.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran yang dianggap baik dalam era informatisasi dan industrialisasi abad 21 adalah pola pembelajaran yang diselenggarakan secara demokratis. Pembelajaran yang demokratis antara lain mengandung makna;

¹⁸Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 37

1. Pola pembelajaran yang lebih mengutamakan kebutuhan belajar para peserta. Artinya bahwa proses pembelajaran lebih memperhatikan dan mengutamakan kebutuhan belajar peserta didik daripada kebutuhan administratif semata;
2. Tumbuhnya dinamika pembelajaran yang bersifat autokritik. Artinya, para pendidik (guru) siap melakukan kritikan kepada para peserta didik dan siap pula dikritik oleh para peserta didik. Tujuannya dalam rangka memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar’
3. Pendidikan dilaksanakan secara adil, artinya para pendidik memperlakukan peserta didik secara adil. Para pendidik diusahakan mampu membebaskan diri dari kepentingan ego dan atau kelompoknya;
4. Pelaksana pendidikan harus dapat menyelenggarakan prinsip belajar yang berkeadilan, yakni prinsip belajar yang memfungsikan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan peran dan kegunaannya. Dalam prinsip belajar berkeadilan, semua peserta didik diperlakukan sama sesuai dengan statusnya sebagai warga belajar yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
5. Para pendidik tidak memperlakukan peserta didik secara diskriminatif, yakni membedakan status dan haknya antara yang satu dengan yang lainnya;
6. Proses pembelajaran dilakukan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Peserta didik mempunyai hak untuk didengar pendapatnya, dihargai martabatnya, dilindungi statusnya, dan dikembangkan semua potensi dan jati dirinya sesuai dengan kemampuan, minat, motivasi, kebutuhan dan gaya belajarnya. Pendidik tidak berhak memperlakukan peserta didik melampaui batas-batas hak dan martabat peserta didik. Artinya, tidak diperkenankan menghina dan berlaku kasar kepada peserta didik di depan umum, apalagi melakukan ancaman dan kekerasan terhadap peserta didik;

Pola pembelajaran yang demokratis tidak berarti peola pembelajaran yang bebas nilai, artinya proses pembelajaran tetap terikat oleh etika, nilai, dan tata aturan yang berlaku terlebih nilai-nilai keagamaan¹⁹.

Pembahasan

Berdasarkan penjelasan tentang perencanaan pendidikan serta implikasinya terhadap kebijakan pendidikan khususnya di era informatisasi dan globalisasi sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pendidikan tidak hanya sebatas dipahami sebagai “anak sekolahan yang pergi ke sekolah” semata.

¹⁹ Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing...*, hal. 39

Dengan dalih untuk meningkatkan mutu dan standar pendidikan maka diadakanlah berbagai usaha dan peraturan untuk menyeragamkan pendidikan nasional. Berdasar dari asumsi-asumsi efisiensi dan keseragaman maka pendidikan nasional diusahakan diatur melalui standar-standar (salah satunya adalah standar proses pendidikan) serta berbagai peraturan yang menjamin uniformitas suatu sistem. Berbagai cara dilaksanakan dengan menerapkan prinsip *TotalQualityManagement* (TQM) di dalam bidang pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan yang dicita-citakan. Berbagai upaya standardisasi dikembangkan untuk menyeragamkan mutu pendidikan di seluruh Negara. Memang hasil sistematisasi pendidikan, dilihat dari segi tertentu, menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan seperti percepatan pencapaian target-target kuantitatif pendidikan. Namun demikian, banyak pula hasil-hasil negatif yang dilahirkan di dalam usaha sistematisasi tersebut. Matinya inisiatif, kehilangan berfikir kritis serta berbagai pengaruh-pengaruh negatif lainnya telah lahir dari sistem pendidikan yang sangat kaku karena diatur oleh keinginan pencapaian keseragaman nasional. Maka untuk mengejar bahkan menghilangkan ketertinggalan, rumusan kebijakan pendidikan harus berorientasi pada pengembangan akademik peserta didik tanpa mengabaikan adanya unsur-unsur kebhinekaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, arah baru perencanaan pendidikan harus dapat menghasilkan output kebijakan yang dapat mengakomodasi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Perencanaan pendidikan haruslah merumuskan pendidikan secara luas, bukan hanya sekedar dibatasi sebagai *schooling*. Jika pendidikan ditafsirkan sebagai *schooling* semata, akan muncul anggapan bahwa tanggung jawab pendidikan dilimpahkan semuanya kepada tanggung jawab sekolah. Hal ini tentu menyebabkan terasingnya pendidikan dari kehidupan nyata dan terlemparnya masyarakat dari tanggung jawab pendidikan. Rumusan mengenai adanya jenis pendidikan formal dan non-formal perlu disempurnakan lagi yaitu melengkapinya dengan pendidikan in-formal, di mana pendidikan informal inilah yang justru lebih memegang peran penting dalam pembentukan tingkah laku manusia. Dalam menghadapi era industrialisasi dan informatisasi, kebijakan Pendidikan harus menyertakan unsur pendidikan in-formal tersebut.
2. Menghadapi tantangan informatisasi dan industrialisasi abad-21, rumusan kebijakan pendidikan semaksimal mungkin harus melibatkan masyarakat.

Hal ini karena pendidikan pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan hidup masyarakat, atau dengan kata lain merupakan bagian dari kebudayaan. Dengan demikian, tujuan pendidikan yang selama ini hanya kepada pembentukan intelektual semata-mata haruslah diubah meliputi pembentukan seluruh spektrum intelegensi manusia. Oleh sebab itu, proses pendidikan maupun pembelajaran di sekolah bukan hanya ditujukan kepada sekelompok kecil anak-anak yang memiliki intelegensi akademik, tetapi juga harus meliputi pengembangan berbagai macam intelegensi seperti intelegensi emosional, intelegensi estetik, intelegensi interpersonal, dan seterusnya.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan sebagaimana di atas, maka arah perencanaan pendidikan harus mengarah kepada kebijakan pendidikan yang mengarahkan manusia bukan hanya cerdas dalam arti menguasai kecerdasan akademik tetapi yang terpenting ialah menjadikan peserta didik mampu menguasai keterampilan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus menjadi manusia yang berbudaya. Dengan demikian, perencanaan pendidikan menghadapi era informatisasi dan industrialisasi abad 21 haruslah mewujudkan rumusan kebijakan yang menjadikan pendidikan sebagai *educated human being* sekaligus *educated and civilized human being* yaitu pendidikan yang mampu menjadikan masyarakatnya menjadi manusia yang cerdas dan sekaligus beradab.

Penutup

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah didiskusikan tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa point penting sebagai berikut;

1. Perencanaan pendidikan merupakan upaya mewujudkan rumusan kebijakan pendidikan dalam membangun kekuatan sosial yang ikut memberi bentuk, corak dan arah pada kehidupan masyarakat Indonesia di masa depan. Perencanaan pendidikan dalam upaya menghadapi tantangan informatisasi dan industrialisasi abad 21 merupakan upaya penentuan program/strategi/langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Maka perencanaan pendidikan haruslah menjadi fondasi utama bangunan pendidikan Indonesia
2. Sebagai bentuk rumusan perencanaan pendidikan menghadapi kompetensi global, terdapat tiga indikator besar yang dapat penulis kedepankan dalam menopang perencanaan pendidikan, yaitu Profesionalitas dan Kompetensi

guru, optimalisasi kualitas lembaga pendidikan, serta implementasi Standar Nasional Pendidikan dengan maksimal.

Perencanaan pendidikan harus menghasilkan rumusan kebijakan pendidikan yang mendukung pembentukan seluruh spektrum intelegensi peserta didik. Oleh sebab itu, proses pendidikan/pembelajaran di sekolah bukan hanya ditujukan kepada sekelompok kecil anak-anak yang memiliki intelegensi akademik, tetapi juga harus meliputi pengembangan berbagai macam intelegensi seperti intelegensi emosional, intelegensi estetik, intelegensi interpersonal, dan seterusnya.

Daftar Pustaka

- Alfreda, Ega. "Lulusan Sarjana Menjadi Penyumbang Pengangguran Terbanyak di Indonesia". <https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/27/lulusan-sarjana-menjadi-penyumbang-pengangguran-terbanyak-di-indonesia/>
- Danielsen, O. Samdal, Hetland, and Wold. "School-related social support and students'perceived life satisfaction." *The Journal of Educational Research*, vol. 102, No. 4, 303-320, DOI: 10.3200/JOER.102.4.303-320, 2010
- Elitok Kesici, Ayşe, dan Veysel Karani Ceylan. "Quality of school life in Turkey, Finland and South Korea". *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, Vol. 9, No. 1, March 2020, pp. 100-108
- Ismail, Feiby, dan Mardan Umar. "Implementasi Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Islam ;Studi Multisitus di MAN Model 1 Manado, MAN 1 Kotamobagu dan MAN 1 Kota Bitung." *Jurnal Ilmiah Iqra'* Vol. 14, No. 1 (2020), 78-95
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, BAB II, h. 34-41
- Machali, Imam , dan Didin Kurniadin. *Manajemen Pendidikan; Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 145
- Muis Daeng Pawero, Abdul. "Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, dan K-13." *Jurnal Ilmiah Iqra'* Vol. 14, No. 1 (2018), 42-59
- Muis Daeng Pawero, Abdul. "Analisis Kritis Kebijakan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Kurikulum Pendidikan Islam." *JIEP; Journal of Islamic Education Policy*, Vol.2, No. 2 (2017), 166-178

- Mulyasana, Dedy. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 7
- Oviyanti, Fitri. “Tantangan Pendidikan Islam di Era Global.” *Nadwa; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.7, No. 2 (2013), 264-282
- Park. “Life satisfaction among Korean children and youth: A developmental perspective.” *School Psychology International*, vol. 26, 2005, pp. 209-223
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran*. (Jakarta: 2019), h. 49
- Sholeh Hoddin, Mohammad. “Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* Vol. 14, No. 1 (2020), 15-30
- T.D.E., Ellong, dan Abdul Muis Daeng Pawero. “Analisis Kritis Tentang Kebijakan Standar Proses Pendidikan Di Sekolah/Madrasah.” *Proceeding; The 1st Annual Conference on Islamic Education Management* , no. 2 (2018), 847-852
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2010), hal. 15
- Undang-undang R.I, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Copyright © 2021 **Journal Dirasah**: Vol.4, No. 1, Februari 2021 , p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN: 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal Dirasah** is the property of **Journal Dirasah** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>

Dirasah, Vol.4, No. 1, Februari 2021